

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA
SKPD KABUPATEN ACEH TAMIANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

YAYAT SETIAWAN
NPM : 1702110096



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 9 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

YAYAT SETIAWAN
NPM : 1702110096

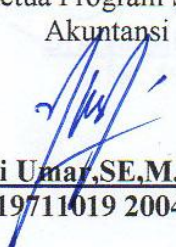
Dengan judul:

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH (STUDI ADA SKPD KABUPATEN ACEH
TAMIANG)**

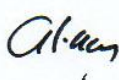
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

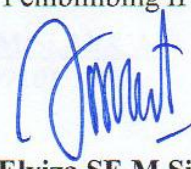
Ketua Program Studi
Akuntansi


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

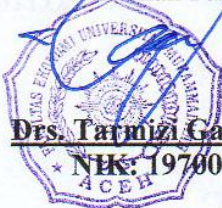
Pembimbing I


Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Pembimbing II


Elviza, SE, M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi




Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 9 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

YAYAT SETIAWAN
NPM : 1702110096

Dengan judul:

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH (STUDI ADA SKPD KABUPATEN ACEH
TAMANG)**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 25 Februari 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak. CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Anggota

Elviza, SE, M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001

Anggota

Syamsidar, SE, M.Si, Ak
NIK. 19730921 199901 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 9 Maret 2022

Yang Menyatakan



Yayat Setiawan

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yayat Setiawan
NPM : 1702110096
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH (STUDI ADA SKPD KABUPATEN ACEH TAMIANG)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 9 Maret 2022

Yang Menyatakan,




Yayat Setiawan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang)”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak selaku ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

4. Bapak Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak. CA Selaku pembimbing pertama
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
5. Ibu Elviza, SE, M.Si Selaku pembimbing kedua Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Aceh
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf
Pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu
pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan
semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Akuntabilitas Keuangan Daerah	8
2.1.1.1 Definisi Akuntabilitas Keuangan Daerah.....	8
2.1.1.2 Macam-Macam Akuntabilitas.....	10
2.1.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas	11
2.1.1.4 Indikator Akuntabilitas Keuangan Daerah.....	12
2.1.2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	12
2.1.2.1 Definisi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah..	12
2.1.2.2 Komponen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	16
2.1.2.3 Unsur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	16
2.1.2.4 Prinsip Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ...	17
2.1.2.5 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	18
2.2. Penelitian Sebelumnya	20
2.3. Kerangka Pemikiran.....	23
2.4. Hipotesis	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Desain Penelitian	26
3.1.1. Tujuan Penelitian.....	26
3.1.2. Jenis Penelitian	26
3.1.3. Horison Waktu.....	27
3.1.4. Unit Analisis	27
3.2. Teknik Pengumpulan Sampel.....	27
3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	28
3.4. Definisi Operasional Variabel	29
3.5. Teknik Analisis Data	30
3.6. Pengujian Data	31
3.6.1. Pengujian Validitas.....	31
3.6.2. Pengujian Reliabilitas	31
3.7. Pengujian Hipotesis	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	34
4.2. Karakteristik Responden	35
4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	37
4.3.1 Uji Validitas Instrumen	37
4.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen	39
4.4 Analisis Deskriptif	40
4.4.1 Variabel Kinerja Karyawan	40
4.4.2 Variabel Sistem Informasi Akuntansi	42
4.5 Pengujian Hipotesis.....	46
4.6 Pembahasan.....	48
4.6.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	50
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Matrik perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya	21
Tabel 3.1 Jumlah Pegawai pada Pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang	28
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	29
Tabel 3.3 Skala Likert	31
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	35
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas.....	38
Tabel 4.3 Uji Reliabilitas variabel penelitian (Alpha)	39
Tabel 4.4 Penjelasan Responden Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah	40
Tabel 4.5 Penjelasan Responden Terhadap Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	42
Tabel 4.6 Pengaruh variabel bebas terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	25

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA
SKPD KABUPATEN ACEH TAMIANG)**

**YAYAT SETIAWAN
NPM : 1702110096**

Pembimbing I : Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak. CA
Pembimbing II : Elviza, SE, M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menguji Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang). Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode survei dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Objek dalam penelitian ini yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang) Sampel penelitian ini sejumlah 44 responden. Data penelitian dikumpulkan melalui kuisisioner, dan studi dokumentasi. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan model regresi linier sederhana dan diolah dengan menggunakan program bantuan SPSS (*Statistikal Product and Service Solutions*) versi 22, uji parsial dimaksud untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai hubungan sangat kuat terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang).

Kata Kunci : *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Keuangan Daerah*

**THE INFLUENCE OF REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS ON
REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTABILITY (STUDY ON
SKPD ACEH TAMIANG REGENCY)**

**YAYAT SETIAWAN
NPM : 1702110096**

Advisor I : Dr. H. Aliamine, SE, M. Si, Ak. CA

Advisor II : Elviza, SE, M.Si

ABSTRACT

The purpose of this study was to test the Regional Financial Accounting System on Regional Financial Accountability (Study on SKPD Aceh Tamias District). This research is a research using survey method with associative descriptive approach. The object of this research is the Regional Financial Accounting System on Regional Financial Accountability (Study on SKPD Aceh Tamias Regency). The sample of this research is 44 respondents. Research data were collected through questionnaires, and documentation studies. The research data were analyzed using a simple linear regression model and processed using the SPSS (Statistical Product and Service Solutions) version 22 program, the partial test was intended to partially determine the effect of the independent variable on the dependent variable at the 95% confidence level ($\alpha = 0.05$). The results showed that the Regional Financial Accounting System had an effect on Regional Financial Accountability (Study on SKPD Aceh Tamias District). The Regional Financial Accounting System has a very strong relationship to Regional Financial Accountability (Study on SKPD Aceh Tamias District).

Keywords: Regional Financial Accounting System and Regional Financial Accountability

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam perkembangan dunia ekonomi saat ini peranan akuntansi sangat penting untuk memutuskan sesuatu agar dalam menjalankan kegiatan tidak menimbulkan kerugian. Kegiatan yang dilakukan oleh akuntansi dalam kegiatan ekonomi mencakup kegiatan mencatat, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasikan data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, perusahaan, pemerintah, dan anggota masyarakat lainnya. Sistem informasi akuntansi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terintegrasi menghasilkan laporan berbentuk data transaksi bisnis yang diolah dan disajikan menjadi sebuah laporan keuangan yang memiliki arti bagi pihak yang membutuhkannya.

Untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabilitas. Salah satu cara dengan penyempurnaan sistem akuntansi pemerintahan secara menyeluruh dengan menerbitkan peraturan perundangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas

dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang accountable untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu.

Penggunaan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seringkali tercermin dari penggunaan anggaran. Para pejabat instansi pemerintah daerah maupun pusat yang sering melakukan pemborosan, yang berakibat negara terbebani oleh pembiayaan yang meliputi tidak produktif, efektif, dan efisiensi kerja yang mana tentu berdampak pada rendahnya kinerja dari organisasi sektor publik baik pusat atau daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan terjadinya reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah diwajibkan untuk memenuhi akuntabilitas yang mana memperhatikan beberapa hal, yaitu: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

Akuntabilitas di sektor publik digunakan tidak hanya untuk meminimalisir kecenderungan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang tetapi dapat juga untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, serta pemerintah wajib mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat. Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada dasarnya anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan terutama untuk organisasi privat atau swasta, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang

harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas melalui anggaran meliputi perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Bentuk reformasi anggaran dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian terpenting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah, dimana hasil pertanggungjawaban laporan keuangan memiliki pengaruh yang besar dalam menilai baik buruknya kinerja pemerintah. Semakin akuntabel tingkat pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin baik pula tingkat pencapaian kinerja pemerintah. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik terkait pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang telah dilakukan, dimana akuntabilitas sendiri merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka hal ini menjadi kewajiban bagi pelaksana pemerintahan.

Proses perencanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas publik dan transparansi publik. Dimana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai kemauan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas publik, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawaban kepada pemberi amanah untuk meminta pertanggung

jawaban tersebut. Lain halnya dengan transparansi publik, SKPD bersedia menyediakan informasi yang cukup akurat relevan dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentuknya kepada pihak luar tentunya dalam hal ini masyarakat umum/publik.

Fenomena yang terjadi bahwa rendahnya tingkat akuntabilitas pemerintah daerah disebabkan empat masalah utama, yakni sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, lalu ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur. Ketiga, kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, keempat, perincian kegiatan tidak sesuai dengan tujuan kegiatan. Selanjutnya kurangnya pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh pihak satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Aceh Tamiang akan menurunkan kinerja aparatur. Pengawasan keuangan bagi SKPD sangat penting, jika tidak ada pengawasan maka aparatur SKPD dapat mengerjakan tugas seperti laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prosedur, misalnya kurangnya tingkat ketelitian dalam membuat laporan dan tidak mengikuti peraturan yang berlaku, tidak dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan dapat melakukan kecurangan bagi aparatur (tidak transparansi) yang tidak ada pengawasan sehingga dapat berdampak pada kinerja SKPD di Kabupaten Aceh Tamiang. Setiap SKPD memiliki tanggungjawab dalam pelaporan keuangan dan perlu adanya pengawasan dari pihak tertentu seperti pengawasan BPK Kabupaten Aceh Tamiang terhadap SKPD.

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) menurut Rasdianto (2017:6) adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD). SAKD mempunyai hubungan dengan akuntabilitas keuangan daerah, semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka akuntabilitas keuangan daerah juga akan ikut meningkat.

Dari hasil survey awal pada tanggal 26 s/d 28 Januari tahun 2021 dengan 11 pegawai SKPD Kabupaten Aceh Tamiang bagian keuangan dan penyusunan laporan keuangan dapat diketahui bahwa tidak semua pegawai memiliki kompetensi yang tinggi sehingga menjadi salah satu kendala bagi pegawai dalam penyusunan anggaran dengan efektif atau tepat waktu. Rendahnya kompetensi pegawai dalam hal pengelolaan keuangan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang. Pengetahuan pegawai bidang keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang dalam pengelolaan anggaran belum baik, sehingga pengelolaan anggaran dan kegiatan anggaran yang telah disusun tidak dapat dijalankan dengan baik. Hal ini berdampak pada penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Umumnya yang menyebabkan pengetahuan pegawai bidang keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang seperti kurangnya pelatihan yang diadakan oleh pemerintah kepada aparatur yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan atau terbatasnya pegawai yang dapat mengikuti pelatihan kerja sehingga tidak semua pegawai memiliki pengetahuan yang tinggi dalam penyusunan laporan keuangan pada setiap SKPD.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang).**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu apakah SAKD berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah (studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang).

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh SAKD terhadap akuntabilitas keuangan daerah (studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang)

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian ini mengarah kepada aspek berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan dan dapat menjadi salah satu referensi dalam masalah sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas keuangan daerah.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memperdalam serta memperkaya pengetahuan dan wawasan peneliti dalam mempelajari sumber daya manusia dan pengelolaannya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam membantu mengoptimalkan tugas-tugas dewan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran dan masukan bagi pemerintah khususnya di pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada variabel SAKD terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang).

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Akuntabilitas Keuangan Daerah

2.1.1.1 Definisi Akuntabilitas Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:24) akuntabilitas publik adalah suatu laporan yang dilakukan oleh instansi untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Adisasmita (2016:30) akuntabilitas adalah instrument pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi sertamisi organisasi. Menurut Kusumastuti (2017:2) Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.

Menurut Djalil (2017: 63) Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang memunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Beberapa kajian teoritis menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Bastian (2017:385) Akuntabilitas Publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Kemudian menurut Ghartey (2017:308) tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Halim (2016:20) menyatakan akuntabilitas publik adalah Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

2.1.1.2 Macam-Macam Akuntabilitas

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Menurut Ulum (2016:42) tipe akuntabilitas dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas yang berlaku untuk setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintah Negara termasuk juga pemerintah yang mana masing-masing pejabat atau pengurus publik baik individu ataupun kelompok secara tingkatan wajib untuk mempertanggung jawabkan kepada atasannya langsung tentang perkembangan kinerja aktivitas secara periodik ataupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

2. Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas yang menempel kepada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang sudah diterima dan dilakukan maupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

Menurut Supriatna (2016:102) akuntabilitas dapat dibedakan atas: *democratic accountability*, *professional accountability*, dan *legal accountability*, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. *Democratic Accountability*

Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara administrative dan *politic accountability*. Menggambarkan pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Pada negara-negara demokratis, menteri pada parlemen. Penyelenggaraan pelayanan publik akuntabel kepada menteri/pimpinan instansi masing-masing. Dalam konteks ini pelaksanaan akuntabel dilakukan secara berjenjang dari pimpinan bawah ke pimpinan tingkat tinggi secara hierarki yaitu Presiden pada MPR.

2. *Professional Accountability*

Dalam akuntabilitas profesional, pada umumnya para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan public interest atau kepentingan masyarakat.

3. *Legal Accountability*

Berdasarkan kategori akuntabilitas legal (hukum), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan public goods dan public service yang merupakan tuntutan (demand) masyarakat (costumer). Dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan

tugasnya sebagaimana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.

Berdasarkan beberapa kajian teoritis menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tipe akuntabilitas diantaranya akuntabilitas internal, akuntabilitas eksternal, akuntabilitas demokratis, akuntabilitas profesional dan kategori akuntabilitas legal (hukum).

2.1.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2016:19), akuntabilitas dibagi menjadi 2, adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Vertikal
Akuntabilitas vertikal merupakan suatu pertanggungjawaban segala aktivitas yang telah dilakukan kepada tingkatan yang lebih tinggi.
- b. Akuntabilitas Horizontal
Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dilakukan yang tingkatannya sejajar. Tingkatan akuntabilitas dibagi menjadi lima jenis, yaitu:
 1. *Accountability For Probability and Legality*
Accountability For probability berkaitan dengan penghindaran terhadap kejahatan jabatan khususnya untuk meyakinkan bahwa dana telah digunakan dengan benar dan dengan cara yang benar. Sementara *Accountability for legality* menekankan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang tidak melampaui batas.
 2. *Process Accountability*
Berkaitan dengan apakah terdapat prosedur-prosedur yang memadai yang diterapkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tertentu, serta usaha untuk meyakinkan apakah aktivitas tertentu dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 3. *Performance Accountability*
Menekankan pada kinerja dari suatu entitas yang disampaikan kepada publik.
 4. *Programme Accountability*
Menekankan pada program dari suatu entitas yang disampaikan pada publik.
 5. *Policy Accountability*
Menekankan pada kebijakan dari suatu entitas yang disampaikan kepada publik.

2.1.1.4 Indikator Akuntabilitas Keuangan Daerah

Menurut Madiasmo (2016:24) indikator akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan pemerintah tentang prosedur
2. Pengetahuan pemerintah tentang pembiayaan
3. Kemampuan pemerintah dalam menyampaikan hasil
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat
5. Adanya sarana bagi publik
6. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
7. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
8. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.

2.1.2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.2.1 Definisi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengaturan pengelolaan anggaran yang dapat mengacu pada ketentuan perundang-undangan pada UU Nomor 71 Tahun 2003 tentang keuangan Negara menjelaskan bahwa Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Ketentuan perundang-undangan tersebut secara limitatif telah menjelaskan siklus pengelolaan keuangan Negara/daerah yang dimulai dari: Perencanaan, Pembahasan, Pengesahan, Penatausahaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban. Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah menurut Rasdianto (2017:6) adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Rahayu, 2017:2). Penerapan Sistem Akuntansi Daerah berdasarkan standart akuntansi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Menurut Peraturan menteri dalam negeri No. 21 tahun 2011, Sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengum-pulan data, pencatatan, pengihkti-saran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertang-gungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam menghasilkan laporan yang berkualitas maka setiap entitas harus membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum atau dalam internasional dikenal dengan International Accounting Standards Board (IASB) yang sekarang disebut dengan International Financial Reporting Standar (IFRS) sebagai prasyarat dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam perusahaan. Sama halnya dengan perusahaan, pemerintah juga harus dapat menghasilkan laporan keuangan denga mengacu standar yang berlaku dalam pemerintahan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan baik (Defitri, 2018:68).

Sistem akuntansi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (UU No. 17, 2003). Untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan segala aspek keuangan yang terdapat didalamnya maka setiap kepala daerah harus dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri No. 13, 2006).

Oleh karena itu anggaran yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah haruslah dapat memenuhi keinginan masyarakat, karena bagaimanapun pemerintah merupakan pelayan masyarakat, hal ini disebabkan oleh peran penting dalam mewujudkan optimalisasi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat merupakan tujuan penting dari keberadaan organisasi pemerintah (Siswadi, 2017). Dengan demikian pemerintah ataupun pemerintah daerah harus dapat merencanakan dan menyelenggarakan program-program kerja yang tujuan akhirnya adalah menciptakan kepuasan masyarakat yang tertuang dalam

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan.

Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Hal ini disebabkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan, serta mengolah keuangan daerah dan data terkait mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan menjadi informasi keuangan yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Dengan menggunakan sistem akuntansi, maka resiko akan terjadinya suatu kekeliruan dan kesalahan dapat diminimalisir dalam pencatatan atau perhitungan yang dapat memungkinkan pemerintah daerah mengalami resiko yang lebih berat (Herawati, 2017).

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu sub sistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi (Defitri, 2018:68) bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga hasil penelitian Wati dkk (Wati, Herawati, & Sinarwati, 2017) yang memberikan informasi bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan demikian jika sistem keuangan daerah diterapkan dengan baik dari awal maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin lebih baik.

2.1.2.2 Komponen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Romney (2017:3) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari lima komponen:

1. Orang-orang, yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.
3. Data, tentang proses-proses bisnis organisasi.
4. *Software*, yang dipakai untuk memproses data organisasi.
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk computer, peralatan pendukung (*peripheral device*), dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

2.1.2.3 Unsur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Romney (2017:12) menyatakan bahwa terdapat delapan unsur dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu :

1. Tujuan
Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mencapai satu tujuan atau lebih yang menggambarkan tenaga penggerak dibelakang sistem dan tujuan nya.
2. Masukan
Data harus dikumpul dan dimasuk kan sebagai input dalam sistem. Masukan yang umum dari suatu sistem informasi akuntansi adalah data transaksi dan jurnal.
3. Keluaran
Informasi yang dihasilkan oleh sistem disebut keluaran. Keluaran yang umum dari SIA adalah laporan keuangan dan laporan-laporan internal seperti daftar piutang dagang, anggaran, dan proyeksi cashflow.
4. Penyimpanan data
Data disimpan dalam sistem informasi akuntansi untuk pemakaian berikut nya. Data yang disimpan harus diperbaharui secara teratur.
5. Pengolahan
Data harus diolah untuk menghasilkan informasi. Sebagian organisasi memproses data menggunakan komputer.
6. Instruksi dan prosedur
Sistem informasi akuntansi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan informasi tanpa instruksi dan prosedur secara rinci. Instruksi dan prosedur untuk pemakai biasanya terdapat pada prosedur manual.
7. Pengguna
Orang-orang yang berhubungan dengan sistem dan pemakai informasi yang dihasilkan disebut pengguna yang meliputi semua orang yang

melaksanakan dan mencatat semua transaksi serta semua orang yang mengatur dan mengendalikan sistem.

8. Pengendalian dan pengukuran konsumen

Informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem harus akurat, bebas dari kesalahan dan dilindungi dari akses-akses yang tidak sah. Pengendalian dan pengukuran konsumen dibuat dalam suatu sistem informasi akuntansi untuk menjamin informasi yang akurat dan pengoperasian sistem secara tepat.

2.1.2.4 Prinsip Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatan, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Menurut Peraturan Pemerintah R.I Nomor 71 Tahun 2010 berikut ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikan laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

2. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain disebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Periodisitas (*Periodicity*)
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.
6. Konsistensi (*Consistency*)
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.2.5 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Sholeh (2017;10) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas
Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik, yang mencakup kerugian daerah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang,

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. *Value for money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*, prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien.

3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan pasti jumlahnya.

4. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang mencakup administrasi temuan mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

5. Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians selisih terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan, yang mencakup kekurangan penerimaan kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

2.2. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2020) dengan judul Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Superdi (2017) dengan judul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sijunjung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sijunjung).

Asfiryati (2017) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada SKPD Kota Dumai). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Lily (2016) dengan judul Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sistem akuntansi keuangan

dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kurnia (2016) dengan judul Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat). Hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah Propinsi Sumatera Barat, dan (2) Kualitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan Propinsi Sumatera Barat. Adapun penelitian sebelumnya, sebagai pendukung penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Hasil-Hasil Deskripsi Penelitian Sebelumnya

No.	Judul dan Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Nasution, 2020)	Analisis regresi linier berganda dan penelitian kuantitatif	Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	- Variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas - Metode analisis data - Teknik pengumpulan data	- Lokasi penelitian - Populasi dan sampel - Variabel kaulitas laporan keuangan

Lanjutan Tabel 2.1.

No.	Judul dan Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sijunjung) (Superdi, 2017)	Analisis regresi linier berganda dan penelitian kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sijunjung).	- Variabel sistem akuntansi keuangan daerah, dan akuntabilitas keuangan daerah - Metode analisis data - Teknik pengumpulan data -	- Lokasi penelitian dan Populasi dan sampel - Variabel teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian intern
3.	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada SKPD Kota Dumai) (Asfiryati, 2017)	Analisis linier berganda dan penelitian kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	- Variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas keuangan - Metode analisis data - Teknik pengumpulan data	- Lokasi penelitian dan Populasi dan sampel - Variabel komitmen organisasi, kualitas laporan keuangan

Lanjutan Tabel 2.1

No	Judul dan Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh). (Lily, 2016)	Analisis regresi linier berganda dan penelitian kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sistem akuntansi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	- Variabel sistem akuntansi keuangan daerah, dan akuntabilitas keuangan - Metode analisis data - Teknik pengumpulan data -	- Lokasi penelitian dan Populasi dan sampel - Variabel komitmen organisasi
5	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat) (Kurnia, 2016)	Analisis Path dan penelitian kuantitatif	Hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah Propinsi Sumatera Barat, dan (2) Kualitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan Propinsi Sumatera Barat..	- Variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas keuangan - Metode analisis data - Teknik pengumpulan data	- Lokasi penelitian dan Populasi dan sampel - Tahun penelitian

Sumber : Data diolah (2021)

2.3. Kerangka Penelitian

2.3.1 Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas

Keuangan Daerah

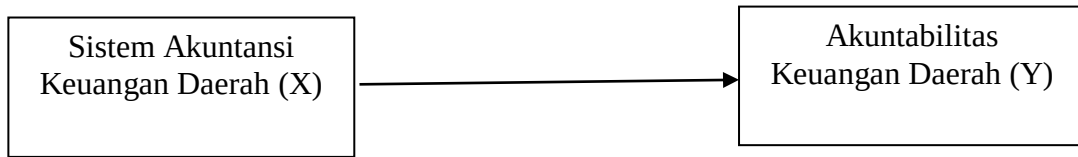
Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan

pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Aksesibilitas laporan keuangan daerah sebagai bentuk kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. Hasil penelitian dari Nusution (2020) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Selanjutnya hasil penelitian dari Kurnia (2016) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Dalam mewujudkan praktik akuntabilitas tersebut, setiap SKPD diwajibkan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) kepada pemerintah daerah yang kemudian harus menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) atas kinerjanya secara horizontal kepada DPRD dan pihak terkait dan akuntabilitas secara vertikal dengan menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Pemerintah secara berjenjang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dimana Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan akuntabilitas keuangan dan juga menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja dalam ukuran efisiensi dan efektivitas.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Kerangka Penelitian



Sumber: Berdasarkan Penelitian sebelumnya dan dikembangkan oleh peneliti (2021)

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

H : SAKD berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah (studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2017:152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu; tujuan penelitian, jenis penelitian, tingkat investasi penelitian, horizon waktu dan unit analisis.

3.1.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk membuktikan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu pengaruh SAKD terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

3.1.2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi empiris dengan pendekatan penelitian Asosiatif. Penelitian asosiatif menurut Sugiyono (2018:14) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2018:5).

3.1.3. Horizon Waktu

Penelitian deskriptif dalam penelitian ini berdasarkan rentang waktu (*time series*). *Time Series* merupakan penelitian yang dilakukan dalam satu waktu

tertentu dengan satu fokus. Studi *time Series* dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan November tahun 2020 sampai dengan selesai.

3.1.4. Unit Analisis

Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk menghitung unit analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Karakteristik tingkat analisis yaitu bahwa tingkat yang lebih rendah termaksud dalam tingkat yang lebih tinggi. Peneliti perlu memutuskan unit analisis bahkan saat kita merumuskan pertanyaan penelitian karena metode pengumpulan data, ukuran sample, dan bahkan variabel yang termaksud dalam kerangka kadang ditentukan oleh tingkat dimana data dijumlahkan untuk analisis. Berdasarkan unit observasi yang dijadikan unit analisis dari penelitian ini adalah individu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pegawai pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang yang berjumlah 44 orang (yaitu hanya pegawai di bidang pelaporan keuangan). Menurut Notoatmodjo (2016:115) populasi penelitian adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2018:115) Populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang. Menurut Sugiyono (2018:62) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Metode sensus dimana seluruh elemen populasi diselidiki satu per satu. Data yang diperoleh sebagai hasil pengolahan

sensus disebut data yang sebenarnya (*true value*), atau sering disebut parameter (Supranto, 2016). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 44 pegawai di bidang pelaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang. Jumlah pegawai pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan bidang masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Pegawai pada Pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang

No	Keterangan	Jumlah SKPD	Jumlah Sampel
1	Sekretariat Kabupaten Aceh Tamiang	1	1
2	Sekretariat DPRK Aceh Tamiang	1	1
3	Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang	1	1
4	Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	16	16
5	Badan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	3	3
6	Kantor Urusan Keistimewaan dan Kekhususan Kabupaten Aceh Tamiang	7	7
7	Perangkat Daerah lainnya Kabupaten Aceh Tamiang	3	3
8	Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang	12	12
Jumlah		44	44

Sumber: SKPD Kabupaten Aceh Tamiang

3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat dan reliabel. Sumber data yang digunakan antara lain (Sugiyono, 2018:139):

- 1) Data primer diperoleh dari dokumentasi dan daftar pertanyaan (kuisisioner).

Untuk memperoleh data mengenai variabel yang diteliti maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan Kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup, yaitu pertanyaan yang dirancang berbentuk pilihan yang telah disediakan.

- 2) Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka melalui jurnal maupun yang diambil dari internet untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan dengan format tertentu dan berbagai pilihan didalamnya untuk dijawab oleh responden.
2. Wawancara yaitu mengadakan komunikasi langsung dalam bentuk tanya jawab dengan pihak-pihak terkait.

3.4. Definisi Operasionalisasi Variabel

Berikut ini dikemukakan operasional masing-masing variabel dari variabel SAKD dan akuntabilitas keuangan daerah.

Tabel 3.2
Operasional dan Indikator Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	Item Kuis
EksogenVariabel						
1.	Akuntabilitas keuangan daerah (Y)	Suatu laporan yang dilakukan oleh instansi untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2016:24)	• Pengetahuan pemerintah tentang prosedur • Pengetahuan pemerintah tentang pembiayaan • Kemampuan pemerintah dalam menyampaikan hasil • Mampu memberikan ruang bagi masyarakat • Adanya sarana bagi publik	1-5	Likert	A1-A10

Lanjutan Tabel 3.2

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	Item Kuis
EksogenVariabel						
2.	SAKD (X)	SAKD merupakan salah satu sub sistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup SAKD mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi (Sholeh, 2017;10)	• Akuntabilitas • Value for money • Kejujuran dalam mengelola keuangan publik • Transparansi • Pengendalian • Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan • Akurasi dan kelengkapan informasi • Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.	1-5	Likert	B1-B16

Sumber: Data diolah (2020)

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan skala likert dari satu sampai lima instrumen penelitian merupakan alat ukur untuk mengukur variabel yang diteliti. Jumlah instrumen tergantung pada jumlah variabel. Setiap instrumen akan mempunyai skala. Untuk dapat mengkuantitatifkan data yang diperoleh dari daftar pertanyaan (*kuesioner*) yang telah dijawab oleh para responden. Kemudian data jawaban para responden diberi skor dengan menggunakan sistem *Skala Likert*. Dalam hal ini ada lima klasifikasi jawaban yang diberikan dengan kemungkinan pemberian skor sebagai berikut:

Tabel 3.3
Skala Pengukuran Kuisisioner

No.	Keterangan	Score
1.	Sangat Tidak Setuju	1
2.	Tidak Setuju	2
3.	Kurang Setuju	3
4.	Setuju	4
5.	Sangat Setuju	5

Sumber: Arikunto (2018:45)

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Pada penelitian ini, kuesioner diisi oleh responden yang mewakili dari (studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang). Terlebih dahulu dikonsultasikan kepada responden sebelum kuesioner disebarkan untuk mengetahui apakah kalimat-kalimat dalam kuesioner cukup dimengerti.

3.5. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan model regresi linier sederhana dan diolah dengan menggunakan program bantuan SPSS (*Statistikal Product and Service Solutions*) versi 22. Adapun persamaan model regresi linear sederhana dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b X + e$$

Keterangan :

- Y = Akuntabilitas Keuangan Daerah
- X = SAKD
- a = Konstanta
- b = Parameter Regresi
- e = Error Term

3.6. Pengujian Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner yang diisi langsung oleh responden, oleh karena itu untuk mengukur handal atau tidaknya kuisisioner digunakan analisis validitas dan reliabilitas.

3.6.1. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *analysis corelation* yang menjelaskan korelasi (hubungan) di antara sejumlah variabel dengan menggunakan satu set dimensi yang disebut faktor. Ukuran data

dianggap valid apabila korelasi hitung lebih besar dari angka kritis nilai $-r$ (*table product moment*). menurut Sugiyono (2018:267) “ Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh penelitian. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai alphanya lebih besar dari 0,60 (Malhotra, 2016)

3.6.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrument adalah tingkat konsistensi hasil yang dicapai oleh kuesioner, meskipun digunakan secara ber-. Pendekatan yang digunakan adalah dengan cara menghitung *Cronbach Alpha* masing-masing variabel yang terlibat. *Cronbach Alpha* menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Menurut Sugiyono (2016:172) adalah Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, kestabilan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu).

3.7. Pengujian Hipotesis

Untuk menerima atau menolak kedua hipotesis dalam penelitian ini, maka dilihat hasil *output* SPSS. Kemudian *output* tersebut dimasukan ke kriteria menerima atau menolak hipotesis. Kriteria ini berpedoman pada Gani (2015) dan Supranto (2009:190). Paparan kriteria menerima atau menolak hipotesis akan diuraikan berikut ini:

1) Kriteria menerima atau menolak hipotesis pertama:

- Jika koefisien regresi variabel X_1 sama dengan nol ($\beta_1=0$), atau nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan ($p_{yx1} > 0,05$), maka H_{a2} ditolak. Artinya SAKD tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah

- Jika koefisien regresi variabel X_1 tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$), atau nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan ($p_{yx1} < 0,05$), maka H_{a2} diterima. Artinya SAKD berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Tamiang pada awalnya merupakan satu kerajaan yang pernah mencapai puncak kejayaan dibawah pimpinan seorang Raja Muda Sedia yang memerintah selama tahun 1330 – 1366 M. Pada masa kerajaan tersebut wilayah Tamiang dibatasi oleh daerah-daerah; Sungai Raya / Selat Malaka di bagian Utara, Besitang di bagian Selatan, Selat Malaka di bagian Timur dan Gunung Segama (gunung Bendahara / Wilhelmina Gebergte) di bagian Barat.

Pada masa kesultanan Aceh, kerajaan Tamiang telah mendapat Cap Sukureung dan hak Tumpang Gantung (Zainuddin, 1961, 136 – 137) dari Sultan Aceh Darussalam, atas wilayah Negeri Karang dan negeri Kejuruan Muda. Sementara negeri Sulthan Muda Seruway, negeri Sungai Iyu, negeri Kaloy dan negeri Telaga Meuku merupakan wilayah-wilayah yang belum mendapat cap Sikureung dan dijadikan sebagai wilayah protector bagi wilayah yang telah mendapat cap Sikureung.

Pada tahun 1908 terjadi perubahan Staatblad No.112 tahun 1878, yakni Wilayah Tamiang dimasukkan ke dalam Geuverment Aceh en Onderhoorigheden yang artinya wilayah tersebut berada dibawah status hokum Onderafdeling.

”TAMIANG” adalah sebuah nama yang berdasarkan legenda dan data sejarah berasal dari : ” Te – Miyang ” yang berarti tidak kena gatal atau kebal gatal dari miang bambu. Hal tersebut berhubungan dengan cerita sejarah tentang Raja Tamiang yang bernama Pucook Suloo, ketika masih bayi ditemui dalam rumpun

bambu Betong (istilah Tamiang ” bulooh ”) dan Raja ketika itu bernama Tamiang Pehok lalu mengambil bayi tersebut. Setelah dewasa dinobatkan menjadi Raja Tamiang dengan gelar ” Pucook Suloo Raja Te – Miyang “, yang artinya “seorang raja yang ditemukan di rumpun rebong, tetapi tidak kena gaatal atau kebal gatal”.

4.2 Karakteristik Responden

Responden yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini yaitu pegawai dibidang pelaporan keuangan dengan memiliki karakteristik berdasarkan umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir dan masa kerja yang terlihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Umur		
	a. 20-25 Tahun	2	4,5
	b. 26-31 Tahun	6	13,6
	c. 32-37 Tahun	18	40,9
	d. 38-43 Tahun	11	25,0
	e. 44-50 Tahun	7	15,9
Total		44	100,0
2	Jenis kelamin		
	a. Pria	26	58,1
	b. Wanita	18	40,9
Total		44	100,0
3	Status Perkawinan		
	a. Belum Menikah	9	20,5
	b. Menikah	35	79,5
Total		44	100,0
4.	Pendidikan Terakhir		
	a. Diploma	9	20,5
	b. Sarjana	31	70,5
	c. Pasca Sarjana	4	9,1
Total		44	100,0

Lanjutan Tabel 4.1

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
5	Lama Bekerja		
	a. < 5 Tahun	2	4,5
	b. 5-10 Tahun	12	27,3
	c. 11-15 Tahun	12	27,3
	d. > 15 Tahun	18	40,9
Total		44	100,0

Sumber: Data diolah, 2021

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa responden yang berusia antara 20 sampai 25 tahun sebanyak 2 responden atau 4,5% , yang berusia antara 26 sampai dengan 31 tahun yaitu sebanyak 6 responden atau 13,6%, yang berusia antara 32 sampai dengan 37 tahun yaitu sebanyak 18 responden atau 40,9%, yang berusia antara 38 sampai dengan 43 tahun sebanyak 11 responden atau 25% dan yang berusia di atas 44 tahun sebanyak 7 responden atau 15,9%

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 26 responden atau 59,1% dan responden berjenis kelamin wanita yaitu sebanyak 18 responden atau 40,9%. Kemudian Karakteristik berdasarkan status perkawinan dapat dijelaskan yang belum menikah adalah sebanyak 9 responden atau 20,5% dan yang sudah menikah sebanyak 35 responden atau 79,5%

Karakteristik berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan yang berpendidikan terakhir Diploma yaitu sebanyak 9 responden atau 20,5%, yang berpendidikan terakhir sarjana yaitu sebanyak 31 responden atau 70,5% dan yang berpendidikan pasca sarjana sebanyak 4 responden atau 9,1%.

Berdasarkan karakteristik responden lama bekerja dapat dijelaskan bahwa sebanyak 2 responden atau 4,5% sudah bekerja dibawah 5 tahun, sebanyak 12 responden atau 27,3% dengan masa kerja antara 5 sampai 10 tahun, sebanyak 12

responden atau 27,3% sudah bekerja antara 11 sampai 15 tahun dan sebanyak 18 responden atau 40,9% dengan masa kerja di atas 15 tahun.

4.3 Hasil Pengujian Data

4.3.1 Uji Validitas Instrumen

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji *pearson product-moment coefficient of correlation* dengan bantuan SPSS version 22. Berdasarkan output komputer seluruh pernyataan dinyatakan valid karena memiliki tingkat signifikansi dibawah 5 % sedangkan jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperoleh masing-masing pernyataan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *product moment* dimana hasilnya menunjukkan bahwa semua pernyataan mempunyai nilai korelasi diatas nilai kritis 5 % yaitu di atas 0,297 (dilihat dari tabel lampiran), sehingga pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan memiliki validitas kontras Atau dalam bahasa statistik terdapat konsistensi (*internal consistence*) yang berarti pernyataan-pernyataan tersebut mengukur aspek yang sama. Ini berarti data yang diperoleh adalah valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian. Hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4. 2
Hasil Uji Validitas

No pertanyaan	Variabel	Koefisien	Nilai kritis	Ket
---------------	----------	-----------	--------------	-----

			korelasi	5 % (N=44)	
1	A1	Y	0,576	0,297	Valid
2	A2		0,747	0,297	Valid
3	A3		0,754	0,297	Valid
4	A4		0,713	0,297	Valid
5	A5		0,623	0,297	Valid
6	A6		0,630	0,297	Valid
7	A7		0,759	0,297	Valid
8	A8		0,656	0,297	Valid
9	A9		0,616	0,297	Valid
10	A10		0,383	0,297	Valid
11	B1	X	0,497	0,297	Valid
12	B2		0,369	0,297	Valid
13	B3		0,403	0,297	Valid
14	B4		0,404	0,297	Valid
15	B5		0,561	0,297	Valid
16	B6		0,611	0,297	Valid
17	B7		0,509	0,297	Valid
18	B8		0,842	0,297	Valid
19	B9		0,762	0,297	Valid
20	B10		0,780	0,297	Valid
21	B11		0,608	0,297	Valid
22	B12		0,711	0,297	Valid
23	B13		0,757	0,297	Valid
24	B14		0,801	0,297	Valid
25	B15		0,536	0,297	Valid
26	B16		0,690	0,297	Valid

Sumber: Data Primer (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan semuanya valid, karena mempunyai koefisien korelasi diatas dari nilai kritis korelasi yaitu sebesar 0,297 (dilihat dari lampiran), sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

4.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Pengujian Reliabilitas dilakukan dengan internal consistency atau derajat ketepatan jawaban. Untuk pengujian ini digunakan *Statistical Packaged for Social Sciences* (SPSS). Setelah melakukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui konsistensi hasil sebuah jawaban tentang tanggapan responden. Untuk melakukan pengujian reliabilitas penulis menggunakan program SPSS versi 22. Reliabilitas yang kurang dari 0,6 adalah kurang baik, dan apabila lebih besar dari 0,6 dan mendekati angka 1 berarti reliabilitas instrumen adalah baik”.

Tabel 4.3
Uji Reliabilitas variabel penelitian (Alpha)

No	Variabel	Item Variabel	Nilai Alpha	Kehandalan
1.	Akuntabilitas keuangan daerah (Y)	10	0,898	Handal
2.	SAKD (X)	16	0,884	Handal

Sumber : data diolah, 2021

Hasil uji Reliabilitas dapat dilihat dari nilai *cronbach Alpha*, nilai *cronbach alpa* reliabilitas yang baik adalah yang makin mendekati 1. “Reliabilitas yang kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan lebih dari 0,6 dapat diterima dan reliabilitas dengan *cronbach alpha* 0,8 atau diatasnya adalah baik”.

Dari hasil pengujian reliabilitas diatas dapat diketahui bahwa reliabilitas variabel berdasarkan pengujian reliabilitas dari instrumen, diketahui bahwa hasil pengujian variabel akuntabilitas keuangan daerah, SAKD adalah reliabel karena melebihi dari 0,60.

4.4 Analisis Deskriptif

Penelitian ini mengamati dua variabel bebas (*independent variabel*) yaitu variabel SAKD (X) juga mengamati satu variabel terikat (*dependent variable*) yaitu variabel Y (akuntabilitas keuangan daerah)

4.4.1 Variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah

Hasil penelitian tentang penjelasan responden terhadap variabel akuntabilitas keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Pengetahuan aparatur tentang prosedur akuntabilitas keuangan daerah sudah baik	4	,10	3	6,8	8	18,2	21	47,7	8	18,2	3,59
2	Aparatur memahami tentang prosedur kerja yang diterapkan pada instansi	6	13,6	3	6,8	6	13,6	22	50,0	7	15,9	3,48
3	Pengetahuan aparatur tentang prosedur akuntabilitas keuangan daerah sudah sesuai dengan kemampuannya	3	6,8	6	13,6	5	11,4	22	50,0	8	18,2	3,59
4	Aparatur memahami tentang pembiayaan pemerintahan	2	4,5	3	6,8	9	20,5	22	50,0	8	18,2	3,70
5	Kemampuan aparatur dalam menyampaikan hasil laporan keuangan sudah baik	7	15,9	4	9,1	16	36,4	13	29,5	4	9,1	3,07
6	Aparatur memiliki kemampuan keuangan yang baik dalam menyampaikan hasil	4	9,1	2	4,5	4	9,1	16	36,4	18	40,9	3,95

Lanjutan Tabel 4.4

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Mean
----	-----------------	----------------	--------------	---------------	--------	---------------	------

		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
7	Aparatur mampu memberikan berbagai informasi kepada masyarakat	3	6,8	4	9,1	6	13,6	21	47,7	10	22,7	3,70
8	Aparatur dapat menerima berbagai pendapat dari masyarakat	2	4,5	4	9,1	10	2,7	21	47,7	7	15,9	3,61
9	Adanya sarana dan prasarana publik dapat membantu aparatur dalam menyelesaikan tugas	2	4,5	3	6,8	13	29,5	20	45,5	6	13,6	3,57
10	Aparatur merasa sangat terbantu dengan adanya sarana dan prasarana dalam menyampaikan informasi kepada publik	1	2,3	2	4,5	10	22,7	19	43,2	12	27,3	3,89
Rerata												3,62

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan indikator diatas bahwa pengetahuan aparatur tentang prosedur akuntabilitas keuangan daerah sudah baik diperoleh nilai rata-rata sebanyak 3,59. Aparatur memahami tentang prosedur kerja yang diterapkan pada instansi diperoleh nilai rata-rata sebanyak 3,48. Pengetahuan aparatur tentang prosedur akuntabilitas keuangan daerah sudah sesuai dengan kemampuannya diperoleh nilai rata-rata sebanyak 3,59. Aparatur memahami tentang pembiayaan pemerintahan diperoleh nilai rata-rata sebanyak 3,70. Kemampuan aparatur dalam menyampaikan hasil laporan keuangan sudah baik diperoleh nilai rata-rata sebanyak 3,07. Aparatur memiliki kemampuan keuangan yang baik dalam menyampaikan hasil diperoleh nilai rata-rata sebanyak 3,95. Aparatur mampu memberikan berbagai informasi kepada masyarakat diperoleh nilai rata-rata sebanyak 3,70. Aparatur dapat menerima berbagai pendapat dari masyarakat diperoleh nilai rata-rata sebanyak

Penjelasan responden tentang variabel SAKD terhadap Akuntabilitas keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Akuntabilitas keuangan yang disusun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku	0	0,0	3	6,8	2	4,5	30	68,2	9	20,5	4,02
2	Akuntabilitas yang dibuat aparatur sudah sesuai dengan kebijakan instansi pemerintah	0	0,0	2	4,5	3	6,8	19	43,2	20	45,5	4,30
3	Pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien	0	0,0	1	2,3	2	4,5	26	59,1	15	34,1	4,25

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	

4	Perencanaan pembiayaan yang dibuat oleh aparatur sudah sesuai	0	0,0	1	2,3	3	6,8	21	47,7	19	43,2	4,32
5	Pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan jujur agar masyarakat tetap percaya dengan aparatur pemerintah	0	0,0	4	9,1	5	11,4	22	50,0	13	29,5	4,00
6	Kejujuran dalam mengelola keuangan yang dilakukan oleh aparatur dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat	0	0,0	3	6,8	3	6,8	29	65,9	9	20,5	4,00
7	Adanya pelaporan keuangan yang transparansi, dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada aparatur	4	9,1	1	2,3	4	9,1	28	63,6	7	15,9	3,75
8	Dengan adanya SAKD, maka pengelolaan dapat dilakukan dengan transparan	5	11,4	3	6,8	4	9,1	22	50,0	10	22,7	3,66
9	Adanya pengendalian intern dapat mencegah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	3	6,8	4	9,1	5	11,4	22	50,0	10	2,7	3,73
10	Sistem pengendalian intern yang diterapkan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku	2	4,5	7	15,9	11	25,0	19	43,2	5	11,4	3,41
11	Laporan keuangan pada setiap SKPD dapat dipublikasi di website masing-masing SKPD	1	2,3	6	13,6	13	29,5	19	43,2	5	11,4	3,48

Lanjutan Tabel 4.5

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Mean
----	-----------------	----------------	--------------	---------------	--------	---------------	------

		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
12	Pihak SKPD dapat memberikan informasi mengenai laporan keuangan ketika masyarakat membutuhkan	2	4,5	3	6,8	8	18,2	20	45,5	11	25,0	3,80
13	Laporan keuangan dapat disampaikan dengan akurat	4	9,1	6	13,6	6	13,6	19	43,2	9	20,5	3,52
14	Informasi yang disampaikan mengenai laporan keuangan daerah harus sesuai dengan lengkap	3	6,8	1	2,3	6	13,6	26	59,1	8	18,2	3,80
15	Aparat dapat mempertanggungjawabkan semua laporan keuangan yang telah dibuat	5	11,4	13	29,5	6	13,6	14	31,8	6	13,6	3,07
16	Aparat saling membantu dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan berdasarkan tugas	3	6,8	1	2,3	8	18,2	23	52,3	9	20,5	3,77
Rerata												3,43

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan indikator di atas bahwa akuntabilitas keuangan yang disusun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan nilai rata-rata sebanyak 4,02. Akuntabilitas yang dibuat aparatur sudah sesuai dengan kebijakan instansi pemerintah dengan nilai rata-rata sebanyak 4,30. Pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan nilai rata-rata sebanyak 4,25. Perencanaan pembiayaan yang dibuat oleh aparatur sudah sesuai dengan nilai rata-rata sebanyak 4,32. Pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan jujur agar masyarakat tetap percaya dengan aparatur pemerintah dengan nilai rata-rata sebanyak 4,00. Kejujuran dalam pengelolaan keuangan yang

dilakukan oleh aparat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan nilai rata-rata sebanyak 4,00. Adanya pelaporan keuangan yang transparansi, dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada aparat dengan nilai rata-rata sebanyak 3,75.

Kemudian dengan adanya SAKD, maka pengelolaan dapat dilakukan dengan transparan dengan nilai rata-rata sebanyak 3,66. Adanya pengendalian intern dapat mencegah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan nilai rata-rata sebanyak 3,73. Sistem pengendalian intern yang diterapkan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan nilai rata-rata sebanyak 3,41. Laporan keuangan pada setiap SKPD dapat dipublikasi di website masing-masing SKPD dengan nilai rata-rata sebanyak 3,48. Pihak SKPD dapat memberikan informasi mengenai laporan keuangan ketika masyarakat membutuhkan dengan nilai rata-rata sebanyak 3,80. Laporan keuangan dapat disampaikan dengan akurat dengan nilai rata-rata sebanyak 3,52. Informasi yang disampaikan mengenai laporan keuangan daerah harus sesuai dengan lengkap dengan nilai rata-rata sebanyak 3,80. Aparat dapat mempertanggungjawabkan semua laporan keuangan yang telah dibuat dengan nilai rata-rata sebanyak 3,07. Aparat saling membantu dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan berdasarkan tugas dengan nilai rata-rata sebanyak 3,77 artinya rata-rata responden menyatakan kurang setuju. Dapat disimpulkan nilai rata-rata variabel SAKD sebesar 3,80 artinya responden menyatakan setuju karena skala likert pada satuan angka 4.

4.5 Hasil Penelitian

4.5.1 Hasil Regresi Linier Sederhana

Hipotesis menyatakan bahwa SAKD (X) terhadap akuntabilitas keuangan daerah (studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang). Model yang digunakan untuk menduga pengaruh tersebut adalah:

Tabel 4.6
Pengaruh Variabel Bebas terhadap akuntabilitas keuangan daerah
(studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,630	,440		-1,433	,159
SAKD (X)	0,885	,114	,833	9,774	,000

Sumber: Hasil Penelitian (2021)

Berdasarkan hasil *ouput* komputer melalui program SPSS seperti terlihat tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -0,630 + 0,885X + e$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diketahui hasil penelitian sebagai berikut:

1) Koefisien Regresi (B)

- a. Dalam penelitian nilai konstanta adalah -0,630 artinya bila mana SAKD dianggap konstan, maka akuntabilitas keuangan daerah Konsumen pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang, adalah sebesar -0,630 pada satuan skala likert atau akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh.
- b. Koefisien regresi SAKD sebesar 0,885. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel SAKD secara relatif akan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah (studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang) sebesar 88,5% dengan asumsi dianggap konstan.

4.5.2 Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar kenaikan suatu linier dapat dijelaskan melalui hubungan antara variabel-variabel (korelasi). Jika seluruh nilai dari variabel-variabel tersebut dapat memenuhi suatu persamaan dengan benar, maka dapat dikatakan terdapat korelasi yang sempurna dalam model analisis ini. Dari output SPSS dapat diketahui tingkat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat antara lain:

Tabel 4.7
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,833 ^a	,695	,687	,44764

a. Predictors: (Constant), SAKD (X)

Berdasarkan dari *output* komputer di atas maka diperoleh koefisien korelasi dalam penelitian diperoleh nilai sebesar 0,883 dimana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 88,3%. Artinya SAKD (X) mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap akuntabilitas keuangan daerah (studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang).

Sementara itu koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dengan nilai sebesar 0,687 artinya bahwa sebesar 68,7% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (Akuntabilitas keuangan daerah (studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam faktor SAKD (X). Sedangkan selebihnya sebesar 31,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel seperti dijelaskan di atas seperti peran audit, kompetensi SDM, kualitas laporan keuangan, pemahaman akuntansi dan pengendalian internal.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh SAKD Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Untuk menguji pengaruh SAKD terhadap akuntabilitas keuangan daerah (studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang), digunakan uji Statistik. Apabila Jika $\beta_1 = 0$: maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sebaliknya : Jika $\beta_1 \neq 0$: maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Pengaruh SAKD (X) terhadap variabel Akuntabilitas keuangan daerah (Y) dapat dilihat pada Tabel 4.6 yaitu nilai $\beta = 0,885$, $\beta_1 \neq 0$, maka keputusannya adalah menerima H_a dan menolak H_0 . Dari hasil uji signifikansi bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara SAKD terhadap akuntabilitas keuangan daerah (studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang), artinya kebijakan tentang variabel SAKD mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah (studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk SAKD adalah sebesar 0,885 yang berarti SAKD berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah (studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang). Hasil analisis menunjukkan nilai β sebesar 0,885 dengan hasil perhitungan $\beta \neq 0$, dapat disimpulkan SAKD berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah (studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Nasution (2020), Superdi (2017) dan Asfiryati (2017) karena variabel yang diteliti yaitu SAKD sama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Semakin baik SAKD maka semakin baik akuntabilitas keuangan daerah pada suatu SKPD Kabupaten Aceh Tamiang

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. SAKD berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah (studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang). Hal ini dikarenakan SAKD pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga berdampak baik pada akuntabilitas keuangan daerah seperti akuntabilitas keuangan yang disusun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, kemudian akuntabilitas yang dibuat aparatur sudah sesuai dengan kebijakan instansi pemerinta, pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
2. SAKD mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap akuntabilitas keuangan daerah (studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang). Artinya SAKD yang baik pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, hal ini disebabkan pengetahuan aparatur tentang prosedur akuntabilitas keuangan daerah sudah baik, aparatur memahami tentang prosedur kerja yang diterapkan pada instansi, kemudian pengetahuan aparatur tentang prosedur akuntabilitas keuangan daerah sudah sesuai dengan kemampuannya, aparatur memahami tentang pembiayaan pemerintahan dan kemampuan aparatur dalam menyampaikan hasil laporan keuangan sudah baik

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur bagian pelaporan keuangan serta pemahaman dengan baik, misalnya menyampaikan informasi yang jelas kepada apratur dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah supaya aparatur dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu.
2. Diharapkan kepada pemerintah daerah khususnya pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang agar dapat mempermudah aparatur dalam menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien misalnya mengadakan pelatihan kerja kepada aparatur yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo (2017). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Suatu Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asfiryati, Dewi. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada SKPD Kota Dumai). *JOM Fekon Vol. 4 No. 1, Hlm 1-14*
- Bastian, Indra.(2017). *Sistem Pengendalian Manajemen SektorPublik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Defitri, Siska Yulia. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita Vol. 3, No. 1, Hal 64-75*
- Djalil, Rizal. (2017). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta:PT semesta Rakyat Merdeka.
- Empat
- Ghartey (2017) *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Ghozali, Imam (2016) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang..
- Harahap, S. S. (2017). *Teori Akuntansi. Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada
- Herawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *STAR-Study & Accounting Research, XI(1), 1–14*.
- Kurnia, Indra. (2016). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat). *Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Vol, 1, (1), Hlm 1-25*
- Kusumastuti, Penny. (2016). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat

- Lily. (2016). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh). *Jom FEKON Vol. 2 No. 2, Hlm 1-15*
- Mahmudi. (2017) *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit. Andi.
- Mulyadi. (2017). *Auditing*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nasution, Hafifah. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Vol 15 (2)*
- Notoatmodjo, S. (2016). *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Permendagri No. 13. Tahun 2006 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*).
- PP No. 71. (2010). *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Rahayu, S. K. & Ely, S. (2017). *Auditing*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Romney, B. M. dan Paul, J. S. (2017). *Accounting Information System*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta
- Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sijunjung). *JOM Fekon, Vol. 4 No. 1, Hlm 1-15*
- Supranto, M.A. (2016). *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Suwatno. & Priansa, D. (2017). *Manajemen SDM dalam organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Ulum, I. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 2(1), 1–11*.

Lampiran 1 Kuisisioner

Kuisisioner ini dimaksudkan untuk penulisan karya akhir yang bersifat ilmiah sebagai persyaratan tugas akhir pada Universitas Muhammadiyah Aceh, yang difokuskan pada bidang Akuntansi

Saya memohon kesediaan saudara untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi angket ini. Saya berharap saudara menjawab dengan leluasa, sesuai dengan apa yang saudara rasakan, lakukan dan alami, bukan yang seharusnya yang ideal. Saudara diharapkan menjawab dengan jujur dan terbuka, sebab tidak ada jawaban yang benar atau salah. Sesuai dengan kode etik penelitian, saya menjamin kerahasiaan semua data. Kesediaan saudara mengisi angket ini adalah bantuan tak ternilai bagi saya. Akhirnya, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan saudara yang telah meluangkan waktu untuk mengisi angket ini, dan peneliti mohon maaf apabila ada pernyataan yang tidak berkenan di hati saudara.

A. Identitas Responden

1. Identitas

1. Umur

- a. 20-25 Tahun ☐
- b. 26-31 Tahun ☐
- c. 32-37 Tahun ☐
- d. 38-43 Tahun ☐
- e. 44-50 Tahun ☐
- f. ≥ 51 Tahun ☐

2. Jenis kelamin

- a. Pria ☐
- b. Wanita ☐

3. Status Perkawinan

- a. Belum menikah ☐
- b. Menikah ☐

4. Tingkat Pendidikan

- a. SLTA ☐
- b. Diploma III ☐
- c. Sarjana (S1) ☐
- d. Pasca Sarjana (S2) ☐
- e. Doktor (S3) ☐

5. Masa Kerja

- a. < 5 Tahun ☐
- b. 5-10 Tahun ☐
- c. 11-15 Tahun ☐
- d. ≥ 15 Tahun ☐

2. Keterangan

Sangat tidak setuju	1
Tidak setuju	2
Kurang setuju	3
Setuju	4
Sangat setuju	5

A. Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)

No	URAIAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Pengetahuan aparatur tentang prosedur akuntabilitas keuangan daerah sudah baik					
2	Aparatur memahami tentang prosedur kerja yang diterapkan pada instansi					
3	Pengetahuan aparatur tentang prosedur akuntabilitas keuangan daerah sudah sesuai dengan kemampuannya					
4	Aparatur memahami tentang pembiayaan pemerintahan					
5	Kemampuan aparatur dalam menyampaikan hasil laporan keuangan sudah baik					
6	Aparatur memiliki kemampuan keuangan yang baik dalam menyampaikan hasil					
7	Aparatur mampu memberikan berbagai informasi kepada masyarakat					
8	Aparatur dapat menerima berbagai pendapat dari masyarakat					
9	Adanya sarana dan prasarana publik dapat membantu aparatur dalam menyelesaikan tugas					
10	Aparatur merasa sangat terbantu dengan adanya sarana dan prasarana dalam menyampaikan informasi kepada publik					

B. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X)

No	URAIAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Akuntabilitas keuangan yang disusun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku					
2	Akuntabilitas yang dibuat aparatur sudah sesuai dengan kebijakan instansi pemerintah					
3	Pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien					
4	Perencanaan pembiayaan yang dibuat oleh aparatur sudah sesuai					
5	Pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan jujur agar masyarakat tetap percaya dengan aparatur pemerintah					

6	Kejujuran dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh aparatur dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat					
7	Adanya pelaporan keuangan yang transparansi, dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada aparatur					
8	Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah, maka pengelolaan dapat dilakukan dengan transparan					
9	Adanya pengendalian intern dapat mencegah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab					
10	Sistem pengendalian intern yang diterapkan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku					
11	Laporan keuangan pada setiap SKPD dapat dipublikasi di website masing-masing SKPD					
12	Pihak SKPD dapat memberikan informasi mengenai laporan keuangan ketika masyarakat membutuhkan					
13	Laporan keuangan dapat disampaikan dengan akurat					
14	Informasi yang disampaikan mengenai laporan keuangan daerah harus sesuai dengan lengkap					
15	Aparat dapat mempertanggungjawabkan semua laporan keuangan yang telah dibuat					
16	Aparat saling membantu dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan berdasarkan tugas					

Lampiran 2 Jawaban Kuisisioner

NO	Identitas					Indikator										Y	Indikator																X	
	IR1	IR2	IR3	IR4	IR5	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16		
1	3	1	2	3	3	4	3	4	4	3	5	5	5	3	4	4	2	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	5	3,625		
2	4	1	2	3	4	4	4	4	4	2	2	4	4	2	2	3,2	3	4	5	3	4	4	4	4	4	2	4	2	4	2	4	3,563		
3	3	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	2	4	4	4	4	2	2	3,75		
4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3,9	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,75		
5	3	2	2	3	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3,8	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3,688		
6	3	1	2	3	3	3	2	2	2	3	5	3	4	4	4	3,2	4	5	5	5	4	4	4	3	3	4	3	3	5	5	5	5	4,188	
7	2	2	2	3	2	5	4	4	3	4	5	4	3	3	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	3	3	3	3	4	5	5	4,125	
8	3	2	2	3	4	2	4	5	4	5	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4,063	
9	3	1	2	2	4	3	3	4	4	3	5	5	2	4	5	3,8	4	4	4	4	3	4	4	2	3	3	3	3	4	3	4	3	3,438	
10	4	1	2	2	4	3	2	4	4	3	5	3	4	4	4	3,6	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3,938	
11	2	1	2	3	2	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4,6	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	2	5	4,375	
12	4	2	2	2	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3,6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3,688	
13	5	2	2	3	4	4	4	4	5	3	5	5	4	4	5	4,3	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	3	4	4	4,188	
14	4	1	2	3	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4,4	4	3	5	5	5	4	5	4	4	3	4	5	4	4	2	4	4,063	
15	3	2	2	3	3	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4,2	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4,563	
16	4	1	2	3	4	4	4	3	5	3	5	4	5	5	5	4,3	5	4	4	3	5	4	4	4	4	3	4	4	5	3	3	4	3,938	
17	5	2	2	3	4	5	2	2	5	2	3	2	2	2	5	3	5	4	4	3	5	4	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2,625	
18	4	2	2	4	3	5	5	5	4	3	4	4	4	5	4	4,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	2	4	3,875	
19	4	1	2	3	3	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4,3	5	5	5	5	4	5	5	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4,188	
20	3	1	2	2	2	3	1	1	3	1	5	3	3	3	3	2,6	3	4	5	5	3	5	3	3	5	3	2	4	3	3	4	3	3,625	
21	3	2	2	2	2	5	1	1	3	1	5	1	3	1	1	2,2	2	2	2	2	4	4	5	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	2,063
22	4	1	2	3	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4,9	4	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4,563	
23	3	1	2	3	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4,9	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	4,375	
24	5	2	2	3	4	2	4	2	3	4	2	4	1	3	2	2,7	2	2	3	4	2	2	4	2	4	2	3	4	2	4	2	4	2	2,875
25	3	1	1	3	3	2	4	4	2	3	4	4	3	2	4	3,2	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	3	4	2	4	1	4	3,375	
26	3	1	1	2	2	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4,2	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4,25	
27	4	2	2	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3,7	4	4	4	5	3	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3,813	
28	2	2	1	3	2	5	5	5	4	3	5	4	4	4	4	4,3	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4,375	
29	2	1	1	3	2	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3,6	4	5	4	5	5	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3,875	
30	5	1	2	3	3	4	4	4	4	1	3	2	3	4	4	3,3	5	5	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	2	4	2	4	3,688	
31	2	2	1	3	2	4	4	4	3	1	1	1	1	4	4	2,7	5	5	5	5	4	4	4	4	3	2	2	4	1	4	3	3	3,625	
32	4	2	2	3	4	3	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4,2	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	3	5	4	5	4	5	4	4,188
33	5	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,25	
34	3	1	2	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3,4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4,063	
35	3	2	2	3	3	4	4	5	4	3	4	4	4	3	3	3,8	5	4	4	5	5	5	4	4	3	3	3	5	4	5	5	4	4,25	
36	3	1	1	3	2	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3,6	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	4	2	4	4,063	
37	5	2	2	4	4	1	1	2	2	1	1	1	3	3	3	1,8	4	5	4	5	5	4	1	1	1	2	2	3	3	3	1	3	2,938	
38	2	1	1	3	2	1	1	2	3	1	3	3	3	3	3	2,3	4	4	5	5	4	5	1	1	1	2	2	2	2	3	1	3	2,813	
39	5	2	2	3	3	1	1	2	1	2	1	2	2	1	3	1,6	4	4	4	5	5	5	1	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2,563
40	3	1	2	2	3	1	1	1	1	2	1	2	2	2	3	5	1,9	4	5	5	5	4	4	1	1	2	2	3	1	1	1	1	3	2,688
41	4	1	2	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	3	3	4,2	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	3	5	4,438	
42	3	1	2	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4,1	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4,125
43	1	1	1	2	1	4	3	3	5	3	3	3	3	5	5	3,7	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4,438	
44	3	2	2	3	2	4	5	3	3	1	5	4	4	3	5	3,7	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	3	4	5	4	5	5	4,438

Lampiran 3 Frequency Table Karakteristik Responden

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 25 tahun	2	4,5	4,5	4,5
	26-31 tahun	6	13,6	13,6	18,2
	32-37 tahun	18	40,9	40,9	59,1
	38-43 tahun	11	25,0	25,0	84,1
	44-50 tahun	7	15,9	15,9	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	26	59,1	59,1	59,1
	Wanita	18	40,9	40,9	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

Status Perkawinan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum menikah	9	20,5	20,5	20,5
	Menikah	35	79,5	79,5	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

Tingkat Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diploma	9	20,5	20,5	20,5
	Sarjana	31	70,5	70,5	90,9
	Pasca Sarjana	4	9,1	9,1	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

Lama Bekerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 5 Tahun	2	4,5	4,5	4,5
	5-10 Tahun	12	27,3	27,3	31,8
	11-15 Tahun	12	27,3	27,3	59,1
	> 15 Tahun	18	40,9	40,9	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

Lampiran 4 Frequency Table Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)

A1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	9,1	9,1	9,1
	TS	3	6,8	6,8	15,9
	KS	8	18,2	18,2	34,1
	S	21	47,7	47,7	81,8
	SS	8	18,2	18,2	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

A2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	6	13,6	13,6	13,6
	TS	3	6,8	6,8	20,5
	KS	6	13,6	13,6	34,1
	S	22	50,0	50,0	84,1
	SS	7	15,9	15,9	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

A3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	6,8	6,8	6,8
	TS	6	13,6	13,6	20,5
	KS	5	11,4	11,4	31,8
	S	22	50,0	50,0	81,8
	SS	8	18,2	18,2	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

A4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	4,5	4,5	4,5
	TS	3	6,8	6,8	11,4
	KS	9	20,5	20,5	31,8
	S	22	50,0	50,0	81,8
	SS	8	18,2	18,2	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

A5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	7	15,9	15,9	15,9
	TS	4	9,1	9,1	25,0
	KS	16	36,4	36,4	61,4
	S	13	29,5	29,5	90,9
	SS	4	9,1	9,1	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

A6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	9,1	9,1	9,1
	TS	2	4,5	4,5	13,6
	KS	4	9,1	9,1	22,7
	S	16	36,4	36,4	59,1
	SS	18	40,9	40,9	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

A7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	6,8	6,8	6,8
	TS	4	9,1	9,1	15,9
	KS	6	13,6	13,6	29,5
	S	21	47,7	47,7	77,3
	SS	10	22,7	22,7	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

A8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	4,5	4,5	4,5
	TS	4	9,1	9,1	13,6
	KS	10	22,7	22,7	36,4
	S	21	47,7	47,7	84,1
	SS	7	15,9	15,9	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

A9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	4,5	4,5	4,5
	TS	3	6,8	6,8	11,4
	KS	13	29,5	29,5	40,9
	S	20	45,5	45,5	86,4
	SS	6	13,6	13,6	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

A10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	2,3	2,3	2,3
	TS	2	4,5	4,5	6,8
	KS	10	22,7	22,7	29,5
	S	19	43,2	43,2	72,7
	SS	12	27,3	27,3	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

Lampiran 5 Frequency Table Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X)

B1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	6,8	6,8	6,8
	KS	2	4,5	4,5	11,4
	S	30	68,2	68,2	79,5
	SS	9	20,5	20,5	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

B2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	4,5	4,5	4,5
	KS	3	6,8	6,8	11,4
	S	19	43,2	43,2	54,5
	SS	20	45,5	45,5	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

B3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2,3	2,3	2,3
	KS	2	4,5	4,5	6,8
	S	26	59,1	59,1	65,9
	SS	15	34,1	34,1	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

B4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2,3	2,3	2,3
	KS	3	6,8	6,8	9,1
	S	21	47,7	47,7	56,8
	SS	19	43,2	43,2	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

B5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	9,1	9,1	9,1
	KS	5	11,4	11,4	20,5
	S	22	50,0	50,0	70,5
	SS	13	29,5	29,5	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

B6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	6,8	6,8	6,8
	KS	3	6,8	6,8	13,6
	S	29	65,9	65,9	79,5
	SS	9	20,5	20,5	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

B7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	9,1	9,1	9,1
	TS	1	2,3	2,3	11,4
	KS	4	9,1	9,1	20,5
	S	28	63,6	63,6	84,1
	SS	7	15,9	15,9	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

B8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	5	11,4	11,4	11,4
	TS	3	6,8	6,8	18,2
	KS	4	9,1	9,1	27,3
	S	22	50,0	50,0	77,3
	SS	10	22,7	22,7	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

B9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	6,8	6,8	6,8
	TS	4	9,1	9,1	15,9
	KS	5	11,4	11,4	27,3
	S	22	50,0	50,0	77,3
	SS	10	22,7	22,7	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

B10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	4,5	4,5	4,5
	TS	7	15,9	15,9	20,5
	KS	11	25,0	25,0	45,5
	S	19	43,2	43,2	88,6
	SS	5	11,4	11,4	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

B11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	2,3	2,3	2,3
	TS	6	13,6	13,6	15,9
	KS	13	29,5	29,5	45,5
	S	19	43,2	43,2	88,6
	SS	5	11,4	11,4	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

B12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	4,5	4,5	4,5
	TS	3	6,8	6,8	11,4
	KS	8	18,2	18,2	29,5
	S	20	45,5	45,5	75,0
	SS	11	25,0	25,0	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

B13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	9,1	9,1	9,1
	TS	6	13,6	13,6	22,7
	KS	6	13,6	13,6	36,4
	S	19	43,2	43,2	79,5
	SS	9	20,5	20,5	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

B14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	6,8	6,8	6,8
	TS	1	2,3	2,3	9,1
	KS	6	13,6	13,6	22,7
	S	26	59,1	59,1	81,8
	SS	8	18,2	18,2	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

B15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	5	11,4	11,4	11,4
	TS	13	29,5	29,5	40,9
	KS	6	13,6	13,6	54,5
	S	14	31,8	31,8	86,4
	SS	6	13,6	13,6	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

B16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	6,8	6,8	6,8
	TS	1	2,3	2,3	9,1
	KS	8	18,2	18,2	27,3
	S	23	52,3	52,3	79,5
	SS	9	20,5	20,5	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

Lampiran 6 Validitas dan Reliability Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,898	10

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
A1	3,59	1,148	44
A2	3,48	1,248	44
A3	3,59	1,148	44
A4	3,70	1,002	44
A5	3,07	1,189	44
A6	3,95	1,238	44
A7	3,70	1,133	44
A8	3,61	1,017	44
A9	3,57	,974	44
A10	3,89	,945	44

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	32,57	53,135	,576	,892
A2	32,68	49,431	,747	,880
A3	32,57	50,484	,754	,880
A4	32,45	52,719	,713	,884
A5	33,09	51,992	,623	,889
A6	32,20	51,376	,630	,889
A7	32,45	50,579	,759	,880
A8	32,55	53,323	,656	,887
A9	32,59	54,294	,616	,890
A10	32,27	57,691	,383	,903

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	275,589	43	6,409	3,930	,000
Within People Between Items	23,157	9	2,573		
Residual	253,343	387	,655		
Total	276,500	396	,698		
Total	552,089	439	1,258		

Grand Mean = 3,62

Lampiran 7 Validitas dan Reliability Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,884	16

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
B1	4,02	,731	44
B2	4,30	,795	44
B3	4,25	,651	44
B4	4,32	,708	44
B5	4,00	,889	44
B6	4,00	,747	44
B7	3,75	1,059	44
B8	3,66	1,238	44
B9	3,73	1,128	44
B10	3,41	1,041	44
B11	3,48	,952	44
B12	3,80	1,047	44
B13	3,52	1,229	44
B14	3,80	1,002	44
B15	3,07	1,283	44
B16	3,77	1,031	44

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
B1	56,84	86,881	,497	,885
B2	56,57	85,414	,369	,883
B3	56,61	87,359	,403	,884
B4	56,55	88,254	,404	,887
B5	56,86	89,655	,561	,893
B6	56,86	90,911	,611	,893
B7	57,11	80,661	,509	,878
B8	57,20	72,213	,842	,862
B9	57,14	75,283	,762	,866
B10	57,45	76,207	,780	,866
B11	57,39	80,196	,608	,874
B12	57,07	77,274	,711	,869
B13	57,34	73,951	,757	,866
B14	57,07	76,437	,801	,866
B15	57,80	77,701	,536	,878
B16	57,09	77,852	,690	,870

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	245,824	43	5,717	7,701	,000
Within People Between Items	76,722	15	5,115		
Residual	428,403	645	,664		
Total	505,125	660	,765		
Total	750,949	703	1,068		

Grand Mean = 3,80

Lampiran 8 Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X) ^b		Enter

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,833 ^a	,695	,687	,44764

a. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19,143	1	19,143	95,534	,000 ^b
	Residual	8,416	42	,200		
	Total	27,559	43			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)

b. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,630	,440		-1,433	,159
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X)	0,885	,114	,633	7,763	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)

NILAI T TABEL

DF	Tingkat Keyakinan			
	99%	97,5%	95%	90%
1	63,656	25,452	12,706	6,314
2	9,925	6,205	4,303	2,920
3	5,841	4,177	3,182	2,353
4	4,604	3,495	2,776	2,132
5	4,032	3,163	2,571	2,015
6	3,707	2,969	2,447	1,943
7	3,499	2,841	2,365	1,895
8	3,355	2,752	2,306	1,860
9	3,250	2,685	2,262	1,833
10	3,169	2,634	2,228	1,812
11	3,106	2,593	2,201	1,796
12	3,055	2,560	2,179	1,782
13	3,012	2,533	2,160	1,771
14	2,977	2,510	2,145	1,761
15	2,947	2,490	2,131	1,753
16	2,921	2,473	2,120	1,746
17	2,898	2,458	2,110	1,740
18	2,878	2,445	2,101	1,734
19	2,861	2,433	2,093	1,729
20	2,845	2,423	2,086	1,725
21	2,831	2,414	2,080	1,721
22	2,819	2,405	2,074	1,717
23	2,807	2,398	2,069	1,714
24	2,797	2,391	2,064	1,711
25	2,787	2,385	2,060	1,708
26	2,779	2,379	2,056	1,706
27	2,771	2,373	2,052	1,703
28	2,763	2,368	2,048	1,701
29	2,756	2,364	2,045	1,699
30	2,750	2,360	2,042	1,697
31	2,744	2,356	2,040	1,696
32	2,738	2,352	2,037	1,694
33	2,733	2,348	2,035	1,692
34	2,728	2,345	2,032	1,691
35	2,724	2,342	2,030	1,690
36	2,719	2,339	2,028	1,688
37	2,715	2,336	2,026	1,687
38	2,712	2,334	2,024	1,686
39	2,708	2,331	2,023	1,685
40	2,704	2,329	2,021	1,684
41	2,701	2,327	2,020	1,683
42	2,698	2,325	2,018	1,682
43	2,695	2,323	2,017	1,681
44	2,692	2,321	2,015	1,680
45	2,690	2,319	2,014	1,679
46	2,687	2,317	2,013	1,679
47	2,685	2,315	2,012	1,678
48	2,682	2,314	2,011	1,677
49	2,680	2,312	2,010	1,677
50	2,678	2,311	2,009	1,676

DF	Tingkat Keyakinan			
	99%	97,5%	95%	90%
51	2,676	2,310	2,008	1,675
52	2,674	2,308	2,007	1,675
53	2,672	2,307	2,006	1,674
54	2,670	2,306	2,005	1,674
55	2,668	2,304	2,004	1,673
56	2,667	2,303	2,003	1,673
57	2,665	2,302	2,002	1,672
58	2,663	2,301	2,002	1,672
59	2,662	2,300	2,001	1,671
60	2,660	2,299	2,000	1,671
61	2,659	2,298	2,000	1,670
62	2,657	2,297	1,999	1,670
63	2,656	2,296	1,998	1,669
64	2,655	2,295	1,998	1,669
65	2,654	2,295	1,997	1,669
66	2,652	2,294	1,997	1,668
67	2,651	2,293	1,996	1,668
68	2,650	2,292	1,995	1,668
69	2,649	2,291	1,995	1,667
70	2,648	2,291	1,994	1,667
71	2,647	2,290	1,994	1,667
72	2,646	2,289	1,993	1,666
73	2,645	2,289	1,993	1,666
74	2,644	2,288	1,993	1,666
75	2,643	2,287	1,992	1,665
76	2,642	2,287	1,992	1,665
77	2,641	2,286	1,991	1,665
78	2,640	2,285	1,991	1,665
79	2,639	2,285	1,990	1,664
80	2,639	2,284	1,990	1,664
81	2,638	2,284	1,990	1,664
82	2,637	2,283	1,989	1,664
83	2,636	2,283	1,989	1,663
84	2,636	2,282	1,989	1,663
85	2,635	2,282	1,988	1,663
86	2,634	2,281	1,988	1,663
87	2,634	2,281	1,988	1,663
88	2,633	2,280	1,987	1,662
89	2,632	2,280	1,987	1,662
90	2,632	2,280	1,987	1,662
91	2,631	2,279	1,986	1,662
92	2,630	2,279	1,986	1,662
93	2,630	2,278	1,986	1,661
94	2,629	2,278	1,986	1,661
95	2,629	2,277	1,985	1,661
96	2,628	2,277	1,985	1,661
97	2,627	2,277	1,985	1,661
98	2,627	2,276	1,984	1,661
99	2,626	2,276	1,984	1,660
100	2,626	2,276	1,984	1,660

Nilai-Nilai r Product Moment Pada Keyakinan 95%

n	Nilai r	n	Nilai r	n	Nilai r
3	0,997	27	0,381	55	0,266
4	0,950	28	0,374	60	0,254
5	0,878	29	0,367	65	0,244
6	0,811	30	0,361	70	0,235
7	0,754	31	0,355	75	0,227
8	0,707	32	0,349	80	0,220
9	0,666	33	0,344	85	0,213
10	0,632	34	0,339	90	0,207
11	0,602	35	0,334	96	0,202
12	0,576	36	0,329	100	0,194
13	0,553	37	0,325	125	0,176
14	0,532	38	0,320	150	0,159
15	0,514	39	0,316	175	0,148
16	0,497	40	0,312	200	0,138
17	0,482	41	0,308	300	0,113
18	0,468	42	0,304	400	0,098
19	0,456	43	0,301	500	0,088
20	0,444	44	0,297	600	0,080
21	0,433	45	0,294	700	0,074
22	0,423	46	0,291	800	0,070
23	0,413	47	0,288	900	0,065
24	0,404	48	0,284	1000	0,062
25	0,396	49	0,281		
26	0,388	50	0,279		

Note: n = Jumlah Sampel